

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua diatas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang memberi kesempatan dan kewenangan yang lebih luas pada daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan kepentingan masyarakat menurut prakara dan kreatifitas sendiri. Hal ini dilakukan Pemerintah Daerah berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai kewenangan yang dimiliki dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah daerah dituntut lebih kreatif dalam memecahkan berbagai permasalahan yang terdapat di daerah. Salah satu permasalahan utama yang terdapat di daerah adalah penciptaan lapangan kerja bagi penduduk daerah. Sekarang ini banyak penduduk usia produktif di daerah yang tidak bekerja akibat kurang tersedianya lapangan pekerjaan di daerah, padahal ukuran paling fundamental bagi keberhasilan suatu pemerintahan dalam sebuah negara modern adalah seberapa jauhkah pemerintahan tersebut berhasil menciptakan lapangan kerja bagi kalangan warga masyarakat. Proses desentralisasi pembangunan yang sedang berkembang pada saat ini sangat erat kaitannya dengan pembangunan daerah. Beberapa hal yang perlu dikaji

berhubungan dengan pembangunan daerah yang terkandung di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang adalah pembangunan daerah harus disesuaikan dengan prioritas dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah serta adanya keseimbangan pembangunan antara satu daerah dengan daerah-daerah lainnya.

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul mempunyai misi Mewujudkan peningkatan produksi dan nilai tambah serta pemanfaatan hasil potensi daerah yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan serta mewujudkan peningkatan investasi, kemantapan kelembagaan dan kesejahteraan UKM. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul mempunyai keinginan untuk mewujudkan potensi usaha kecil menengah yang tangguh dengan usaha yang ramah lingkungan serta mewujudkan peningkatan investasi dengan melakukan kemantapan untuk mewujudkan kesejahteraan Usaha Kecil Menengah (UKM).

Sektor UKM di Kabupaten Bantul mayoritas adalah industri dan industri di Kabupaten Bantul mayoritas merupakan industri kecil. Bantul merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai tingkat perkembangan industri yang relatif tinggi dibandingkan dengan kabupaten Kulonprogo maupun Gunungkidul. Studi – studi mengenai pengembangan industri di daerah Bantul masih sangat diperlukan untuk menghindari kesalahan dalam

penentuan arah pembangunan industri, yang dapat menyebabkan kemunduran sektor industri.<sup>1</sup>

Untuk mendukung pengembangan industri, pewilayahan memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu keberhasilan program industri kecil. Pewilayahan berperan untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah yang memiliki prioritas untuk pengembangan industri kecil. Dengan mengidentifikasi wilayah potensial dan menentukan sentra-sentra industry unggulan yang diharapkan dapat membantu keberhasilan pengembangan industri kecil pedesaan Industri kecil dan menengah yang tersebar di daerah di Bantul yang kurang mendapat perhatian utama, yang sesungguhnya jumlahnya meliputi sebagian besar dari industri kecil yang ada.

Perindustrian berperan dalam menciptakan dan memperluas lapangan kerja dan merupakan sarana efektif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Salah satu sektor dari Pendapatan Asli Daerah adalah sektor perindustrian. Dalam bidang perindustrian Kabupaten Bantul memiliki potensi, untuk meningkat potensi tersebut dilakukan secara optimal tidak menutup kemungkinan menjadi daya tarik bagi wisatawan. Tentunya, hal itu juga menjadi salahsatu potensi bagi pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 1.1

---

<sup>1</sup> <http://kpd.bantulkab.go.id/Renstra-KPDT-Bantul-2011-2015.pdf> diakses pada tanggal 23 November 2014

### Perkembangan Industri Kecil Menengah Tahun 2011-2013

No	Uraian	Tahun		
		2011	2012	2013
1	Unit usaha	18.158	18.235	18.295
2	Tenaga kerja	81.805	81.938	81.998
3	Nilai produksi (nilai ribuan)	800.105.100	800.295.400	800.312.100
4	Nilai tambah (nilai ribuan)	509.266.780	509.495.600	509.525.400
5	Nilai investasi (nilai ribuan)	488.715.800	488.862.200	488.905.130

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul Tahun 2014

Dalam tabel di atas dapat dilihat bahwa unit usaha, tenaga kerja, nilai produksi, nilai tambah dan nilai investasi dari tahun 2011-2013 terus mengalami peningkatan. Pemerintah Daerah mempunyai peran yang cukup signifikan dalam pengembangan industrialisasi di daerah. Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk menentukan arah kebijakan pengembangan industri, baik menyangkut pola pengembangan, macam dan jenis industri, penyelesaian masalah lingkungan, lokasi industri, dan penyusunan prioritas pengembangan maupun mode kemitraaan yang akan dikembangkan. Karena pengembangan industrialisasi tidak lepas dari berbagai permasalahan seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, ekonomi dan manajemen, lingkungan, budaya maupun aturan perundangan, maka penentuan prioritas pengembangan industri harus senantiasa mempertimbangkan dengan semua faktor di atas, sehingga terjadi kesinambungan pembangunan.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja, sektor industri mampu menyerap sebesar 51.459 orang atau sebesar 30% dari total usia produktif di seluruh

Kabupaten Bantul.<sup>2</sup> Studi pengembangan industri di Kabupaten Bantul sangat dibutuhkan, sehingga dapat memperluas kesempatan berusaha dan meningkatkan kesempatan kerja yang pada akhirnya mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun pengembangan industri akan mencapai nilai optimal apabila diketahui potensi yang dimiliki, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, kondisi faktual industri yang ada sekarang baik dari aspek produktivitas, investasi, lokasi maupun interkorelasi industri.

Wilayah Kabupaten Bantul memiliki UKM yang sangat potensial. Untuk itu perlu diupayakan lebih ditingkatkan lagi dalam hal pembinaannya, mempermudah akses-akses yang dibutuhkan untuk para pelaku UKM dan memberikan pembinaan-pambinaan yang dapat menjadi edukasi bagi para pelakunya sehingga sedapatnya memahami seluk belukpersaingan usaha, terutama dalam masalah strategi bersaing.

Meski jumlahnya banyak UKM di Kabupaten Bantul menghadapi masalah utama yaitu nilai tambah produknya yang relatif kecil, hal ini disebabkan oleh modal yang kecil sehingga kesempatan berekspansi menjadi terbatas, sumber daya manusia yang relatif rendah sehingga tingkat kreatifitas dan inovasi produksi juga rendah, jaringan pemasran yang dimiliki terbatas serta sistem manajemen organisasi belum berjalan dengan baik. Dengan demikian proses pengembangan dan pembinaan industri kecil dan menengah menjadi keharusan untuk dilakukan oleh pemerintah daerah di era otonomi

---

<sup>2</sup> <http://kpdt.bantulkab.go.id/Renstra-KPDT-Bantul-2011-2015.pdf> diakses pada tanggal 23 November 2014

daerah ini jika tidak ingin tertinggal dan tersingkir dari perkembangan ekonomi di era pasar bebas mendatang.

Dari latar belakang itulah maka Pemerintah Kabupaten Bantul terus berupaya mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Sesuai dengan keadaan perekonomian di Kabupaten Bantul yang bersumber dari tiga sektor secara berimbang yaitu pertanian perdagangan dan perindustrian. Kabupaten Bantul juga merupakan salah satu daerah yang sangat mendukung berkembangnya Usaha Kecil dan Menengah. Dibuktikan dengan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk melindungi dan mendukung kemajuan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Salah satu yang menjadi potensi di tiap daerah adalah keberadaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). UKM memiliki peran yang strategis dalam penyerapan tenaga kerja dan sumber pendapatan daerah maupun masyarakat lokal. Salah satunya adalah Kota yang menempatkan Usaha Kecil Menengah (UKM) pada posisi yang strategis untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pertumbuhan dan pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan salah satu motor pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul karena sebagian besar pendapatan masyarakat bersumber dari UKM.

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi, sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab organisasi masing-masing dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu aset yang penting dalam suatu Dinas, karena pegawai akan berpotensi positif terhadap

pencapaian tujuan suatu Dinas bila dikelola dengan baik dan tepat. Selanjutnya kelengkapan fasilitas juga merupakan faktor yang berpengaruh pada peningkatan kinerja karena sebagai salah satu pendukung pelaksanaan kegiatan suatu Dinas/Instansi.<sup>3</sup>

Sangat dibutuhkan kinerja yang maksimal dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul sesuai dengan program kerjanya. Indikator kinerja yang digunakan memiliki peran yang penting sebagai masukan dalam pengelolaan kebijakan, program dan kegiatan dalam upaya meningkat Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan dengan pegawai Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul diperoleh kesimpulan bahwa kinerja Dinas secara umum sudah baik, namun masih terdapat kendala-kendala yang menyebabkan kurang maksimalnya Dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pelaku UKM. Masalah-masalah yang ada seperti dalam segi sarana dan prasarana kurang lengkapnya sarana dan prasarana yang terdapat di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul sehingga hal itu dapat menghambat dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada pelaku UKM. Dalam hal SDM juga terdapat permasalahan seperti kurangnya personil, dalam hal ini di bidang Koperasi masih kekurangan personil atau jumlah pegawai, di bidang Koperasi sendiri hanya terdapat 11 dimana hal itu dapat dikatakan masih kurang mengingat banyaknya tanggungjawab yang

---

<sup>3</sup> Shuban Z, "Pengaruh Kepamimpinan, Motivasi dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Administrasi IAIN AR-RANIYI Banda Aceh" dalam Jurnal Manajemen Program Pasca Sarjana Universitas Kuala Banda Aceh, Vol 2 No 1. November 2012

harus diselesaikan salah satunya mengenai pengembangan UKM. Selain itu juga dari segi kemampuan pegawai yang juga menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaannya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Analisis Kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul dalam Mengembangkan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Bantul”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul dalam mengembangkan UKM di Kabupaten Bantul tahun 2013?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dan pendukung yang mempengaruhi kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul dalam mengembangkan UKM di Kabupaten Bantul tahun 2013?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul dalam mengembangkan UKM di Kabupaten Bantul tahun 2013.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dan pendukung yang mempengaruhi kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul dalam mengembangkan UKM di Kabupaten Bantul tahun 2013.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

1. Memberikan informasi tentang hambatan dalam menerapkan kinerja yang baik, serta peningkatan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kabupaten Bantul.
2. Memberikan informasi dan pengetahuan yang lebih mendalam bagi peneliti mengenai kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kabupaten Bantul.
3. Memberikan informasi kepada masyarakat dan pihak terkait mengenai kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kabupaten Bantul.
4. Memberikan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian sejenis.

#### **E. Kerangka Dasar Teori**

Kerangka dasar teori adalah bagian dari penelitian yang menjelaskan variable-variabel dan hubungan antar variable yang berdasarkan pada konsep atau definisi tertentu. Pada bagian kerangka dasar teori ini akan dikemukakan teori-teori yang merupakan acuan bagian penelitian yang dilakukan.

## 1. **Pemerintah Daerah**

Mariun menjelaskan pengertian pemerintah dan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Istilah Pemerintahan menunjukan pada bidang atau dilapangan fungsi bidang tugas dan pekerjaan.
- 2) Istilah pemerintah menunjukan pada badan, organisasi atau alat perlengkapan yang menjelaskan fungsi itu.

Selanjutnya beliau menjelaskan tentang pengertian pemerintahan dalam arti luas dan sempit sebagai berikut:

- 1) Pemerintahan dalam arti luas adalah segala sesuatu tugas kewenangan/kekuasaan Negara yang mengikuti pembidangan dari teori montesquid yang mengikuti bidang Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.
- 2) Pemerintahan dalam arti sempit diartikan sebagai tugas atau kewenangan/kekuasaan dalam eksekutif saja.<sup>4</sup>

Sedangkan menurut Maschab Pemerintah Daerah adalah satuan aparatur Negara yang berwenang memerintah suatu kesatuan

---

<sup>4</sup> Mariun. 1979. *Azas Ilmu Pemerintahan*. Yogyakarta: BPA, Fisipol UGM, hal: 5

masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak dan berkewajiban mengatur rumah tangganya sendiri dalam lingkungan Negara.

Organ yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan Pemerintah Daerah.

- 1) Pemerintah Daerah, dalam konteks Indonesia adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam system dan perinsif Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945. Pemerintahan Daerah data berupa: Daerah Provinsi, yakni terdiri dari Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi. Pemerintah Daerah Provinsi terdiri dari Gubernur dan Perangkat Daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
- 2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yakni terdiri dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota Pemerintah Daerah, Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.<sup>5</sup>

#### **A. Desentralisasi**

Desentralisasi menurut Undang-undang nomor 32 tahun 2004 pasal 7, Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan dari

---

<sup>5</sup> Maschab, Mashuri. 1982. *Pemerintah di Daerah*. Yogyakarta: UGM, hal 32

pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal ini juga berarti bahwa daerah akan menjadi lebih eksis jika mampu benar-benar mengelola dan manage sumber daya lain yang dimiliki.

Desentralisasi adalah prinsip pendelegasian wewenang dari pusat ke bagian-bagiannya, baik bersifat kewilayahan maupun ke fungsian. Prinsip ini mengacu kepada fakta adanya *span of control* dari setiap organisasi sehingga organisasi sehingga organisasi perlu diselenggarakan secara “bersama-sama”.<sup>6</sup>

Desentralisasi dilaksanakan di Indonesia sejak diberlakukannya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 yang selanjutnya disempurnakan oleh Undang-undang 32 tahun 2004, menempatkan masyarakat sebagai pilar utama pemerintah daerah. Terdapat empat tujuan yang hendak dicapai dalam kerangka desentralisasi menurut Undang-undang nomor 22 tahun 1999, yaitu:

- a. Memberdayakan masyarakat dan pembukaan
- b. Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas masyarakat
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat, dan
- d. Mengembangkan peran dan fungsi DPRD.

---

<sup>6</sup> D. Riant Nugroho, 2000, *Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi*, PT Elex Media Komputindo: Jakarta, hal 41

Sedangkan dalam konsideran dan pembukaan Undang-undang nomor 32 tahun 2004, ditegaskan bahwa “pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat”. Namun pada dasarnya, kedua undang-undang tersebut memiliki tujuan yang sama bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah secara parsipatif.

## **B. Otonomi Daerah**

Menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5, otonomi daerah adalah hak, wewenang, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan.

Otonomi dapat diartikan sebagai hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Sarundajang, 1999, 27).<sup>7</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan.

---

<sup>7</sup> D. Riant Nugroho, 2000, *Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi*, PT Elex Media Komputindo: Jakarta, hal. 46.

Otonomi daerah merupakan kekuasaan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri, dan berpemerintah sendiri.

Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah otonom dapat terwujud dengan dijalankannya asas desentralisasi, karena pemerintah menghendaki agar urusan-urusan pemerintah dapat diserahkan kepada daerah yang selanjutnya merupakan tanggung jawab daerah sepenuhnya.

## **2. Kinerja Organisasi**

### **a. Pengertian Kinerja**

Kinerja (*performance*) dapat didefinisikan sebagai tingkat pencapaian hasil atau “*the degree of accomplishment*” atau dengan kata lain, kinerja merupakan tingkat pencapaian tujuan organisasi. Semakin tinggi kinerja organisasi semakin tinggi tingkat pencapaian tujuan organisasi. Jadi suatu organisasi dikatakan memiliki kinerja optimal, jika menghasilkan sesuatu yang menguntungkan bagi para pemegang sahamnya.<sup>8</sup>

Secara etimologis, kinerja adalah sebuah kata yang dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “kerja” yang

---

<sup>8</sup> Hasel Nogi S. tangkilisa, manajemen modern untuk sector public, Balarium dan Co, Yogyakarta, 2003, hal. 1. Ed. Thobari, Arie. 2013. “*Analisis Kinerja Dinas Perijinan Kabupaten Bantul*”. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

menerjemahkan kata dari bahasa asing prestasi, bisa pula berarti hasil kerja. Sehingga pengertian kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.<sup>9</sup>

Kinerja menurut Anwar Prabu Mangkunegara adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Suryadi Prawiro Sentoro memdevinisikan kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi, sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab organisasi masing-masing dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi.<sup>10</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa kinerja merupakan kualitas dan kuantitas dari suatu hasil kerja (output) individu maupun kelompok dalam suatu aktivitas tertentu yang diakibatkan oleh kemampuan alami atau kemampuan yang diperoleh dari proses belajar serta keinginan untuk berprestasi.

#### **b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi**

Menurut Robert L. Mathis dan John H. Jackson faktor-faktor yang memengaruhi kinerja individu tenaga kerja, yaitu:

1. Kemampuan mereka

---

<sup>9</sup> [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com)

<sup>10</sup> F. G. Condro, 1997, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Andi Offset, hal. 41

2. Motivasi
3. Dukungan yang diterima
4. Keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan
5. Hubungan mereka dengan organisasi.

Sedangkan menurut Moenir factor yang mempengaruhi kinerja organisasi public adibagi menjadi dua, yaitu:

- a) Factor Internal merupakan factor dari dalam yang mempengaruhi secara langsung meliputi peralatan pendukung tidak memadai, kualitas SDM masih rendah, dan koordinasi antar unit yang masih kurang. Selain itu factor kualitas sumber daya manusia relative rendah semakin menghambat pemberian pelayanan kepada masyarakat. Kualitas Sdm yang rendah ditandai dengan ketidakmampuan petugas dalam memberikan solusi kepada pengguna pelayan atau lebih dikenal dengan melakukan tindakan dikresi. Factor rendahnya pendidikan yang dimiliki para petugas pelayanan sangat mempengaruhi pemikiran mereka bahwa semua keputusan harus berasal dari atasan dan harus berasal dari atasan dan harus berpeganga teguh kepada juklak atau juknis sehingga ketika seorang pengguna jasa memerlukan pelayanan yang cepat aparat tidak mampu memenuhinya karena harus menunggu instruksi dari atasan terlebih dahulu. Hal ini menyebabkan pelayanan public membutuhkan waktu pelayanan relative lebih lama dan

koordinasi antar unit juga seringkali menghambat pemberian pelayanan karena waktu yang dibutuhkan menjadi lebih lama.

- b) Factor eksternal merupakan factor dari luar yang mempengaruhi secara tidak langsung disebabkan oleh pengguna jasa layanan. Misalnya tidak lengkapnya dokumen-dokumen, pengguna jasa tidak kooperatif dan ketiadaan koordinasi antar instansi seperti dari Kelurahan sampai Kecamatan. Masalah tidak lengkapnya beberapa persyaratan atau dokumen yang harus dilengkapi oleh pengguna jasa sering membuat aparat menolak memberikan pelayanan dan yang menjadi persoalan adalah ketika lokasi tinggal seorang pengguna jasa jauh dari instansi terkait dan masalah kesibukan pengguna jasa membuat penyelesaian urusan menjadi lebih lama.
- c) Kinerja organisasi publik selain di pengaruhi oleh faktor-faktor input juga sangat dipengaruhi oleh proses-proses administrasi dan manajemen organisasi. Dan sebaik apapun input yang tersedia tidak akan menghasilkan suatu produk kinerja sesuai dengan yang diharapkan apabila dalam proses administrasi dan manajemennya tidak bisa berjalan dengan baik yakni antara input dan proses mempunyai keterkaitan yang sangat erat dan sangat menentukan dalam menghasilkan suatu output kinerja sesuai dengan yang diharapkan ataupun tidak.

Menurut Moenir, ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi pelayanan public antara lain:

- a. Faktor kesadaran para pejabat serta petugas yang berketimpang dalam pelayanan umum. Kesadaran tersebut menunjukkan suatu keadaan kepada jiwa seseorang yang merupakan titik temu atau equilibrium dari berbagai pertimbangan sehingga diperoleh suatu keyakinan, ketenangan, ketepatan hati dan keseimbangan dalam jiwa yang bersangkutan.
- b. Faktor aturan yang menjadi landasan kerja pelayanan. Karena aturan merupakan perangkat penting dalam segala tindakan dan perbuatan orang.
- c. Faktor organisasi merupakan alat serta sistem yang memungkinkan berjalannya mekanisme kegiatan pelayanan. Pada dasarnya organisasi merupakan mekanisme, oleh karena itu perlu adanya sarana pendukung yang berfungsi memperlancar mekanisme tersebut dan yang merupakan sarana pendukung yakni sistem, prosedur dan metode.
- d. Faktor pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup minimal. Karena pendapatan merupakan seluruh penerimaan seseorang sebagai imbalan atas tenaga dan pikiran yang telah dicurahkan untuk orang lain, dalam bentuk uang maupun fasilitas dalam jangka waktu tertentu. Pada dasarnya pendapatan harus dapat memenuhi kebutuhan hidup.

- e. Faktor keterampilan petugas. Pada dasarnya keterampilan merupakan kemampuan melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan menggunakan anggota badan dan peralatan kerja yang tersedia.
- f. Faktor sarana dalam pelaksanaan tugas pelayanan. Yang dimaksud dengan sarana pelayanan yakni segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan. Faktor sarana dalam pelaksanaan tugas layanan sangat dibutuhkan untuk memperlancar arus pelaksanaan pekerjaan.

Dengan demikian kinerja organisasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkadang tidak mengalami kelancaran karena dengan semakin banyak pelayanan yang diberikan maka akan semakin kurang optimal kinerja dari para pegawai instansi pemerintahan apabila tidak diikuti dengan pelatihan yang maksimal dari masing-masing pegawai.<sup>11</sup>

### **c. Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja merupakan alat untuk menilai kesuksesan dalam organisasi. Dalam konteks organisasi sector public, kesuksesan dapat digunakan untuk mendapatkan legitimasi dan

---

<sup>11</sup> <http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t13825.pdf>

dukungan public.<sup>12</sup> Berikut ini merupakan hal yang menjadi manfaat dari penilaian terhadap kinerja:

1. Menilai kualitas, kuantitas, dan efisiensi pelayanan.
2. Memotivasi birokrasi pelaksana.
3. Memonitor para kontraktor.
4. Melakukan penyesuaian anggaran.
5. Mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan masyarakat yang dilayani.
6. Menuntut perbaikan dalam pelayanan public.

#### **d. Indicator Pengukuran Kinerja**

Pengukuran dalam mencapai suatu kinerja organisasi sangat penting dilakukan karena dapat mempengaruhi hasil dan tujuan organisasi tersebut. Menurut Salim & Woodward menjelaskan bahwa untuk mengukur tingkat kinerja organisasi ada empat indicator penyusun kinerja yang sangat tepat, diantaranya yaitu:

- a. *Economy* atau ekonomis adalah penggunaan sumberdaya yang sesedikit mungkin dalam proses penyelenggaraan pelayanan public.

---

<sup>12</sup> Mahmudi, 2007, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta, UPPSTIM YKPM, hal. 12, ed. Susanti, Afrida. 2011. "Analisa Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Klaten Tahun 2009. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

- b. *Efficiency* atau efisiensi adalah suatu keadaan yang menunjukkan tercapainya perbandingan terbaik antara masukan dan keluaran dalam suatu penyelenggaraan pelayanan public.
- c. *Effectiveness* atau efektifitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misionis organisasi.
- d. *Equity* atau keadilan adalah pelayanan public yang diselenggarakan dengan memperhatikan aspek-aspek ketentraman.

Menurut Levinne, indicator penyusun organisasi ada tiga indicator, yaitu:

- a. *Responsiveness* atau responsivitas ini mengukur daya tanggap providers terhadap harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntutan customers.
- b. *Responsibility* atau tanggungjawab adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan public itu dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.
- c. *Accountability* atau akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara

penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran-ukuran eksternal yang ada di masyarakat.<sup>13</sup>

Menurut Zeithaml, Parasuraman & Berry, indikator penyusunan organisasi terbagi menjadi lima indikator, yaitu:

- a. *Tangibles* atau ketampakan fisik, artinya petampakan fisik dari gedung, peralatan, pegawai, dan fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki oleh providers.
- b. *Reliability* atau reliabilitas adalah kemampuan untuk menyelenggarakan pelayanan yang dijanjikan secara akurat.
- c. *Responsiveness* atau responsivitas adalah kerelaan untuk menolong customer dan menyelenggarakan secara ikhlas.
- d. *Assurance* atau kepastian adalah pengetahuan dan kesopanan para pekerja dan kemampuan mereka dalam memberikan kepercayaan kepada customer.
- e. *Empathy* adalah pengakuan atau perhatian pribadi yang diberikan oleh providers kepada customers.<sup>14</sup>

Agus Dwiyanto mengukur kinerja birokrasi public berdasar adanya indikator yang dijelaskan sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Produktivitas

---

<sup>13</sup> Ibid, *Manajemen Pelayanan*, hlm 175

<sup>14</sup> Ratminto & Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar:2010), hlm 176

<sup>15</sup> Dwiyanto, Agus dkk, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Gadjah Mada University pers, Yogyakarta, 2012, hlm 50

Yaitu konsep yang tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output. Konsep produktivitas dirasa terlalu sempit dan kemudian General Accounting Office (GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan public itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.

b. Aspek kualitas pelayanan

Isu mengenai kualitas pelayanan semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik yang muncul karena ketidakpuasan dari masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diterima dari organisasi publik. Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat sering kali tersedia secara mudah dan murah. Informasi mengenai kepuasan terhadap kualitas pelayanan sering dapat diperoleh dari media massa ataupun diskusi publik. Akibat akses terhadap informasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan relatif sangat tinggi, maka bisa menjadi satu ukuran kinerja organisasi publik yang mudah dan

mudah dipergunakan. Kepuasan masyarakat dapat pula menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi public.

c. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, mengembangkan program-program pelayanan public sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indicator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidaksiharasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi public. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.

d. Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-

prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implicit. Oleh sebab itu, responbilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.

e. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep dasar akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi public itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Sebagaimana dapat dicermati dalam beberapa indikator-indikator untuk mengukur kinerja, bahwasanya indikator-indikator kinerja sangat bervariasi. Akan tetapi dari sekian banyak indikator-indikator pengukuran kinerja tersebut, peneliti memilih untuk menggunakan indikator pengukuran kinerja yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto. Penulis memilih menggunakan teori tentang pengukuran kinerja yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto tersebut karena dipandang sesuai, lebih tepat dan lebih mampu mengukur kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul dalam mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah.

### **C. Usaha Kecil dan Menengah (UKM)**

#### **a. Pengertian Pariwisata**

Usaha Kecil menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai

dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Usaha Kecil dan Menengah adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI no.99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan kecil yang tidak sehat.<sup>16</sup>

Kriteria usaha kecil menurut UU No. 9 tahun 1995 adalah sebagai berikut:

- i. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempay usaha.
- ii. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- iii. Milik warga Indonesia.
- iv. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar.

---

<sup>16</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Usaha\\_Kecil\\_dan\\_Menengah](http://id.wikipedia.org/wiki/Usaha_Kecil_dan_Menengah), diakses pada tanggal 24 November 2014

- v. Berbentuk usaha Perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

**b. Kriteria Usaha Kecil dan Menengah (UKM)**

Selanjutnya dalam ketentuan Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan kemudian dilaksanakan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, kriteria usaha kecil adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 sebagai berikut :

- a. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- b. Usaha menengah dan usaha besar adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan-penjualan tahunan lebih besar dari kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan usaha kecil.

Secara nominal kriteria dalam ketentuan tersebut memberikan batas Rp. 200 juta rupiah sebagai pembatas antara jumlah modal pengusaha kecil dan pengusaha besar serta menengah. Dalam kenyataannya, praktek industri atau usaha kecil ini ternyata juga muncul dalam aneka tipe yang bermacam-macam, diantaranya dari sudut penggunaan tenaga kerja yaitu:

- a. Industri kerajinan rumah tangga (contttage or household industry) yang hanya mempekerjakan beberapa tenaga kerja. Untuk di Indonesia batasan kategori ini adalah usaha (establishment) yang mempekerjakan satu sampai empat tenaga kerja, terutama anggota keluarga yang tidak dibayar (unpaid family labour). Industri kerajinan rumah tangga ini pada umumnya berorientasi pada pasar local dan menggunakan teknologi tradisional.
- b. Industri kecil yang juga berskala kecil, akan tetapi tidak mengandalkan diri pada tenaga kerja keluarga. Industri ini mempekerjakan tenaga kerja keluarga. Industri ini mempekerjakan tenaga kerja yang dibayar upah dan di dalamnya terdapat suatu hirarkhi antara para pekerja.

Sedangkan dari segi teknologinya, usaha kecil dapat di golongkan atas usaha kecil yang tradisional serta usaha yang berorientasi pada teknologi modern. Penggolongan ini tentunya juga menjadi salah satu faktor yang turut menentukan keberhasilan dalam menyerap pola hubungan kemitraan pada akhirnya. Berbagai variable independent maupun dependent mewarnai usaha kecil ini, tetapi yang pokok bahwa dalam kaitannya dengan struktur perekonomian nasional usaha kecil merupakan salah satu asset yang harus diperhatikan. Konsep demokrasi ekonomi dalam Pancasila tidak membiarkan terjadinya free fight antara yang kuat dengan yang lemah, akan tetapi lebih diarahkan kepada keserasian dan saling

dukung antar pelaku ekonomi, hal itu menimbulkan kewajiban bagi pemerintah untuk mengatur dan menetapkan perundang-undangan menuju :

- a. Meningkatkan kerjasama sesama usaha kecil dalam bentuk koperasi, asosiasi dan himpunan kelompok usaha untuk memperkuat posisi tawar usaha kecil.
- b. Mencegah pembentukan struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan yang tidak wajar dalam bentuk monopoli, oligopoli dan monopsoni yang merugikan usaha kecil.
- c. Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok-kelompok tertentu yang merugikan usaha kecil.<sup>17</sup>

#### **D. Definisi Konseptual**

Definisi konseptual adalah usaha untuk menjelaskan batasan pengertian antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya. Karena sebuah konsep merupakan unsure pokok dari suatu penelitian. Bila masalah dan teorinya sudah jelas biasanya fakta yang menjadi gejala pokok perhatian telah diketahui pula.<sup>18</sup>

Sehubungan dengan pokok masalah dalam penelitian ini, maka perlu diberikan definisi-definisi konsep sebagai berikut:

##### **1. Kinerja**

---

<sup>17</sup> <http://digilib.ump.ac.id/files/disk1/19/jhptump-a-irvankurni-934-2-babii.pdf>, diakses pada tanggal 27 November 2014

<sup>18</sup> Koentjoroningrat. 1974. Metode-Metode Penelitian Sosial, PT. Gramedia, Jakarta. Halaman

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi, sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab organisasi masing-masing dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi.

## 2. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah pemerintahan yang dibentuk dalam wilayah Negara. Pemerintah daerah merupakan aparatur atau organisasi yang berwenang, berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus wilayahnya.

## 3. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul merupakan salah satu unsur pelaksana Pemerintah daerah di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal. Hal ini tertuang dalam pedoman Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Nomor. 49 tahun 2000 dan SK Bupati No. 155 tahun 2000 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindagkop.

## 4. Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Usaha Kecil dan Menengah adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI no.99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan

kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan kecil yang tidak sehat.

## **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi mengenai bagaimana cara melihat, menggunakan serta mengukur variabel sehingga penelitian benar-benar terarah dengan baik dan jelas. Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten

Bantul. Kinerja dari indicator:

1. Aspek Produktivitas
  - a) Program dan kegiatan
2. Aspek kualitas Pelayanan
  - a) Bentuk pelayanan
  - b) Ketrampilan pegawai
3. Aspek Resposivitas
  - a) Kemampuan pegawai
  - b) Daya tanggap pegawai
4. Aspek Responbilitas
  - a) Pencapaian program dan kegiatan
  - b) Pengembangan sarana dan prasarana
5. Aspek Akuntabilitas
  - a) Acuan pelayanan dan Komunikasi

- b) Bentuk pertanggungjawaban
- b. Factor-faktor yang mempengaruhi kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul dalam Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Bantul Tahun 2013, yaitu
  - a. Factor Sumber Daya Manusia
  - b. Factor Sarana dan Prasarana

## **F. Metode Penelitian**

Dalam melakukan suatu penelitian perlu diketahui tentang metode yang digunakan untuk mendapatkan data dalam rangka analisis dan interpretasi data yang ada. Menurut H. Nawawi, dalam melakukan suatu penelitian perlu diketahui tentang metode yang digunakan untuk mendapatkan data dalam rangka analisis dan interpretasi data yang ada. Metodologi adalah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan.<sup>19</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan social secara fundamental tergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri berhubungan dengan orang-orang tersebut.

Sedangkan menurut Hadari Nawawi metode Deskriptif sebagai suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan

---

<sup>19</sup> Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Penerbit UGM Pers, Yogyakarta, 1985

menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek penelitian (seseorang, lembaga, kelompok atau masyarakat) yang berdasarkan yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>20</sup>

Teori dan penelitian ini adalah yang untuk membuat deskripsi, gambaran, lukisan secara sistematis, factual dan actual mengenai fakta, serta hubungan antara fenomena yang dimiliki.

## **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul, dengan didasarkan ingin mengetahui secara jelas kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul.

## **3. Jenis Data**

### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pegawai Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder merupakan pendukung data primer yang diambil dari

---

<sup>20</sup> Nawawi, Hadari . *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, 2001, hal 6

dokumentasi mengenai lokasi penelitian baik dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data menurut Nazir didefinisikan sebagai prosedur yang sistematis dan standard untuk memperoleh data yang diperlukan. Sesuai definisi tersebut teknik ini meliputi wawancara, dokumentasi dan observasi.

##### **a. Wawancara**

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi di mana sang pewawancara melontarkan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh orang yang diwawancarai. Wawancara dalam penelitian ini terdiri dari wawancara yang dilakukan dengan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul dan beberapa pemilik Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Bantul.

##### **b. Dokumentasi**

Penulis dari segi dokumentasi akan mengumpulkan data-data dari objek penelitian sebagai informasi tambahan dalam menjawab tujuan penelitian ini. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah dokumentasi dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul.

c. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mendatangi Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul.

## 5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data yang diperoleh, peneliti menggunakan analisa data secara kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan deskripsi situasi secara sistematis mengenai factor-faktor yang berhubungan dengan fenomena yang diselidiki tanpa menggunakan perhitungan statistik. Jadi dengan analisa data yang diperoleh akan memberikan gambaran secara deskriptif tentang aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian sehingga akan menjadi jawaban atas masalah yang akan diteliti, selanjutnya data tersebut dapat dianalisis dan diinterpretasikan kebenarannya.

Langkah yang perlu dilakukan oleh penulis dalam proses analisa data yaitu mereduksi data, data dan informasi yang diterima dari hasil wawancara yang dipilih dari hal-hal yang pokok yang berhubungan dengan objek penelitian dan mempertajam terhadap focus permasalahan, kemudian mengelompokan data, data-data yang ada diklasifikasikan oleh penulis menurut tujuan yang akan menjadi pembahasan. Tahap terakhir dari analisa yaitu menginterpretasikan dan

menyusun kedalam bentuk kesimpulan dari data yang telah diolah menjadi informasi.